

**JURNALISME DAMAI PEMBERITAAN DEKLARASI
PEMERINTAHAN SEMENTARA PAPUA BARAT PADA TEKS
MEDIA ASING**

**Raden Wahyu Utomo Martianto(Tiar)¹
Umaimah Wahid²**

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur^{1,2}
Jl. Ciledug Raya No. 99, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12269 – Indonesia
martianto.utomo@gmail.com¹, umaimah.wahid@budiluhur.ac.id²

Abstract: *Foreign media played a role in the internationalization of the issue of Papua Merdeka amid the difficulty of access to coverage on West Papua. This research aims to find out how reuters.com, abc.net.au, and time.com frame coverage of the Declaration of the Provisional Government of West Papua, and how peaceful journalism practices. applied in every news of the foreign online media. This study used a qualitative research method using the Robert N. Entman framing analysis tool and the concept of Peaceful Journalism from Galtung. The results of the analysis show that reuters.com, abc.net.au, and time.com constructed the coverage of the West Papua Provisional Government Declaration as a momentum towards the independence referendum. Meanwhile, the peaceful journalism practices of reuters.com, abc.net.au, and time.com have not been fully implemented, so they still have the potential to exacerbate conflicts.*

Keywords: *Declaratio, Framing, Peaceful Journalism, West Papua.*

Abstrak: *Media asing turut berperan dalam internasionalisasi isu Papua Merdeka ditengah sulitnya akses peliputan tentang Papua Barat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reuters.com, abc.net.au, dan time.com membingkai pemberitaan tentang Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, serta bagaimana praktik jurnalisme damai diterapkan dalam setiap pemberitaan media daring asing tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan alat analisis framing Robert N. Entman serta konsep Jurnalisme Damai dari Galtung. Hasil analisis menunjukkan bahwa reuters.com, abc.net.au, dan time.com mengkonstruksi pemberitaan mengenai Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat sebagai momentum menuju referendum kemerdekaan. Sementara praktik jurnalisme damai dari reuters.com, abc.net.au, dan time.com belum sepenuhnya diterapkan sehingga masih berpotensi mempertajam konflik.*

Kata Kunci: *Deklarasi; Framing, Jurnalisme Damai, Papua Barat.*

Pendahuluan

Keinginan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memerdekakan diri dari NKRI sudah dimulai sejak tahun 1961. Sekelompok bangsa Papua menganggap bahwa Papua diintegrasikan secara paksa oleh Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilakukan dibawah tekanan senjata dan ancaman pihak bersenjata Indonesia. Penolakan tersebut berkembang menjadi gerakan separatisme Papua. Konflik yang berkembang hingga saat ini tidak terlepas dengan ambiguitas status politik Indonesia dengan Belanda kala itu (1960-1969). Dimana Indonesia mengambil kebijakan yang ditolak oleh warga Papua, sementara anggapan Belanda bahwa Papua tidak termasuk dalam wilayah Indonesia (Malo, 2017).

Hingga saat ini kelompok separatis Papua lebih terkonsolidasi dalam mencapai tujuan memisahkan diri dari Indonesia dengan membentuk negara sendiri bernama *West Papua*. Hal ini ditandai dengan pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang menggabungkan banyak kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bergerak sebagai kombatan (kelompok bersenjata) maupun melalui politik. ULMWP yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu kemudian mengemban misi

mengkampanyekan Papua Merdeka (*free west Papua campaign*) dengan melakukan lobi-lobi politik ke berbagai negara untuk mendapat dukungan internasional (Sabir, 2018).

Peran ULMWP tersebut dibantu beberapa negara-negara di kawasan Pasifik Selatan telah mengangkat persoalan isu Papua berkembang dari tingkat domestik menjadi isu internasional. Upaya yang dilakukan dengan membawa permasalahan Papua ke ranah internasional seperti *Pacific Island Forum* (PIF), *Organization of African, Caribbean and Pacific States* (OACPS), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR); dan *United Nations General Assembly* (UNGA) (Bayuseno & Windiani, 2020).

Internasionalisasi isu Papua Merdeka kerap mengutamakan isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia, rasisme, dan diskriminasi. Isu humanis merupakan isu yang sedang hangat disuarakan oleh berbagai kalangan di dunia dalam dekade terakhir. Contoh bagaimana isu rasisme terhadap warga Papua di Surabaya pada tahun 2019 mendapat perhatian besar dari berbagai media di dunia. Kemudian kasus terbunuhnya warga kulit hitam di Amerika George Floyd pada Mei 2020 lalu memunculkan tagar *#Black Live Matter* menjadi sebuah bentuk perjuangan manusia dalam melawan rasisme di sosial

media dan media daring. Bahkan bersama-sama dengan *#Black Live Matter*, tagar *#Papuan Live Matter* juga menyuarakan keadilan bagi bangsa Papua yang memiliki ras Melanesia ini di kancah global.

Mengikuti momentum global tersebut Deklarasi Negara Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2020 oleh Ketua *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), Benny Wenda, dengan agenda utama membentuk Pemerintahan Sementara Papua Barat serta memilih Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Papua Barat. Menurut Benny Wenda yang dikutip *idntimes.com* dari *The Guardian* deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak 1963 (Dewi, 2020).

Banyak negara di dunia yang memandang penanganan Indonesia terhadap rakyat Papua telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan hal ini didorong oleh peran media internasional yang sering memberikan sorotan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (Harvey, 2015).

Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat adalah sebuah momen unik ditengah perjuangan melawan rasisme sedang hangat dibicarakan. Deklarasi tersebut disuarakan bukan dari wilayah Papua melainkan dari Inggris. Negara

dimana pemimpin ULMWP, Benny Wenda yang pernah ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia pada tahun 2002 karena terkait demonstrasi pro-kemerdekaan dan pengibaran bendera Bintang Kejora saat itu, namun pada tahun 2003 berhasil kabur ke Inggris dan mendapat suaka politik disana.

Deklarasi tersebut mendapat sorotan dari berbagai media dalam negeri maupun internasional. Di era digital saat ini, pemberitaan sebagian besar di sebarakan melalui media daring. Kelebihan media daring yang bersifat *up to date*, mudah diakses pembaca kapanpun dan dimanapun (Hutami & Sjafirah, 2019). Namun perlu dipahami bahwa media tidak bisa dikatakan sebagai entitas netral. Pemberitaan selain menyajikan realitas namun juga menyisipkan wacana agar setelah menerima informasi pembaca dapat melakukan suatu aksi atau tindakan. Michael Foucault memberi definisi terhadap wacana sebagai praktik sosial. Wacana tersebut mampu mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Menurut Frankfurt, media dimiliki dan didominasi oleh kelompok dominan. Karena itu realitas yang sebenarnya dalam pemberitaan telah terdistorsi atau bahkan palsu. (Eriyanto dalam Eryanto et al., 2019).

Kemampuan media seperti yang disebutkan Foucault pada paragraf

sebelumnya menyebabkan pemberitaan di media seringkali tidak menyelesaikan masalah, namun memperkeruh situasi menjadi semakin panas, terutama dalam pemberitaan-pemberitaan tentang konflik. Dengan demikian penting bagi media untuk menerapkan jurnalisme damai (*peace journalism*) dalam setiap pemberitaannya.

Jurnalisme damai menonjolkan sisi empati terhadap pihak tertindas dibandingkan pendekatan jurnalisme perang yang fokus pada penyampaian pesan bersifat provokatif. Menurut Syam (2016) Landasan jurnalisme damai adalah persuasi kepada seluruh pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap bahaya yang dapat muncul akibat dari suatu konflik (Alam, 2020).

Jurnalisme damai pertama kali dicetuskan oleh Johan Galtung sebagai bentuk perlawanan dari peliputan berita model jurnalisme perang (Lynch & McGoldrick, 2013). Profesor studi perdamaian yang memiliki keresahan dengan kebiasaan media dalam menyajikan pemberitaan tentang konflik. Media memiliki kepentingan tersendiri baik itu politik, ekonomi, maupun independensi. Sebuah skema diadik yang memperlihatkan perbedaan antara jurnalisme damai dan jurnalisme perang dibuat oleh Galtung (Yoedjadi et al., 2020) seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Bingkai Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang

Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
Orientasi pada Perdamaian	Orientasi pada Kekerasan
Orientasi pada Kemanusiaan	Orientasi Para Elit
Orientasi pada Kebenaran	Orientasi pada Propaganda
Orientasi pada Solusi Konflik	Orientasi pada Kemenangan

Sumber: (Lynch & McGoldrick, 2013)

Jurnalisme damai yaitu praktek jurnalistik media yang berkepentingan untuk meredam situasi saat sedang terjadi konflik. Tuntutan bagi para jurnalis adalah untuk tidak memanaskan situasi konflik, sebaliknya wartawan mampu menciptakan jalan tengah untuk penyelesaian konflik yang terjadi (Alam, 2020).

Indonesia memiliki pekerjaan rumah terbesar sejak 1969 hingga saat ini yaitu kondisi kebebasan pers di Papua. Saltford (2003) dalam bukunya mengungkapkan bahwa pembatasan pers di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1963. Begitu pula pakar dari Universitas Victoria, Richard Chauvel dikutip dalam

“*Keeping West Papua In The Dark*” mengkonfirmasi kecenderungan kurangnya kebebasan pers di Papua. Meskipun Presiden Jokowi saat ini mengizinkan jurnalis asing masuk ke Papua, namun masih terdapat perlakuan berbeda terhadap jurnalis asing yang datang ke Papua untuk meliput. Bahkan organisasi wartawan internasional *Reporters Sans Frontier (RSF / Reporters Without Borders)* mengkritisi kondisi kebebasan pers di era Presiden Jokowi saat ini dalam publikasi mereka, dengan poin-poin utama diantaranya: kurangnya akses masuk ke Papua; adanya “*information black hole*”; kerentanan keamanan yang dialami jurnalis, serta adanya praktek suap terhadap jurnalis agar meliput isu-isu yang positif saja (Komarudin, 2016).

Penjelasan pada paragraf sebelumnya membuat peneliti tertarik bagaimana media daring asing mampu mengkonstruksi pemberitaan dengan berbagai keterbatasan kondisi dalam melakukan liputan. Dalam penelitian ini pemberitaan yang peneliti pilih bersumber dari tiga media daring asing yang berbeda yaitu *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com*.

Pemilihan *reuters.com* adalah karena media daring tersebut yang merupakan penyedia berita multimedia internasional terbesar di dunia. Standar penulisan yang dijadikan acuan oleh

reuters.com adalah *The Thomson Reuters Trust Principles* yang tertulis di setiap akhir halaman artikel berita yang diterbitkan. *reuters.com* adalah media asing yang berasal dari Inggris (*British*) tempat dimana Benny Wenda tinggal dan mendeklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Kemudian *abc.net.au* adalah media daring asing yang berpusat di Australia. Pemberitaan *abc.net.au* mengenai Papua diluar kebiasaan media daring lainnya. Ulasannya panjang dan menyeluruh mengenai objek liputan.

Selanjutnya *time.co* adalah media daring asing yang berasal dari USA. Namun memiliki *concern* yang tinggi terhadap masalah Papua. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya ulasan-ulasan berbagai kasus permasalahan Papua.

Saat penelitian ini disusun belum ditemukan penelitian mengenai analisis media terkait Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, karena peristiwa tersebut baru terjadi pada tanggal 1 Desember 2020 lalu, sehingga menambah aspek kebaruan topik penelitian ini. Akan tetapi sebagai pijakan peneliti mengambil beberapa penelitian terkait analisis framing dan jurnalisme damai yang menganalisis media dengan topik pembahasan seputar konflik Papua Barat.

Penelitian pertama adalah studi yang dilakukan Widyaningsih dan Lestari pada tahun 2020 berjudul “*Framing Of Online Media News About Riots In Papua (Studies On www.detik.com and www.reuters.com in 2019).*” Hasil penelitian mengemukakan bahwa *detik.com* melakukan seleksi isu dengan menggambarkan kerusuhan di Papua sebagai isu keamanan juga menonjolkan aspek peran pemerintah dalam mengatasi kerusuhan Papua 2019. Di sisi lain *reuters.com* menggambarkan isu tersebut sebagai isu sosial, dengan menonjolkan aspek tentang diskriminasi dan kekerasan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kerusuhan Papua 2019 (Widyaningsih & Lestari, 2020).

Kemudian studi yang kedua yang ditulis oleh Sukma Alam pada tahun 2020 dengan judul “Jurnalisme Damai Dalam Pembingkai Berita rasisme Mahasiswa Papua Di tribunnews.com dan detik.com” Hasil analisa mengemukakan *framing* yang dilakukan *tribunnews.com* dan *detik.com* sama-sama meletakkan mahasiswa Papua sebagai korban rasisme dan tidak bersalah. Sementara praktik jurnalisme damai bagi *tribunnews.com* selalu berusaha menyampaikan keadilan bagi mahasiswa Papua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan *detik.com* berusaha menyampaikan rekonsiliasi bahwa ujaran rasisme menyangkut bangsa Indonesia.

Subjek pada penelitian pendahulu pertama mengkomparasi antara media dalam negeri dan asing, sedangkan penelitian pendahulu kedua menganalisis dua media dalam negeri.

Berbeda dengan kedua studi pendahulu tersebut, subjek penelitian ini akan menganalisis tiga media yang semuanya merupakan media daring asing. Pemberitaan pada ketiga media daring asing tersebut menjadi objek yang dipilih oleh peneliti dengan melihat adanya potensi kepentingan dari negara-negara asal ketiga media daring asing tersebut terhadap isu Papua. Media daring *The Global Review* pada bulan Oktober 2019 menulis sebuah artikel berjudul “Mengungkap Kepentingan Asing Di Balik Peristiwa Papua”, artikel tersebut dengan lugas menuliskan bahwa isu Papua sangat sarat dengan kepentingan asing di Papua. Terutama Amerika Serikat yang berkepentingan untuk memperkuat daya tawarnya, mengingat Papua sangat kaya dengan sumber daya alamnya (Murtaufiq, 2019).

Kemudian artikel yang dimuat oleh *merdeka.com* pada 11 Desember 2018 berjudul “Campur Tangan Australia Dan Respons PBB Dalam Isu Papua” menyebutkan. Australia selalu terseret ketika isu Papua mengemuka. Artikel tersebut juga melansir laman *Greenleft* yang menyebutkan bahwa Australia

bersama Selandia Baru melihat Papua sebagai kepentingan strategis untuk mempertahankan kolonialisme sebagai daerah penyangga potensi serangan dari arah barat, maknanya mereka ingin Papua tetap menjadi sekutu barat (Wijaya, 2018).

Sedangkan Inggris merupakan negara eropa yang tengah disorot memiliki kepentingan dengan Papua dalam peristiwa Deklarasi Pemerintahan Papua Barat, karena dinilai memberi panggung bagi ULMWP dan Benny Wenda. Pemanggilan Dubes Inggris oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada tanggal 3 Desember 2020 terkait deklarasi yang digaungkan Benny Wenda, untuk dimintai penjelasan mengenai posisi Inggris berkaitan dengan Papua dan Indonesia (CNNIndonesia, 2020).

Ketiga media *online* asing *reuters.com*, *time.com*, dan *abc.net.au* tentunya memiliki ideologi media yang bersumber negara asalnya yaitu Inggris, Amerika, dan Australia. Hal ini menarik bagi peneliti untuk melihat sejauh mana praktik Jurnalisme Damai diterapkan dalam masing-masing pemberitaan tentang Deklarasi Pemerintahan Papua Barat ditengah adanya potensi ideologi kepentingan yang begitu besar dari negara asal ketiga media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com*. terhadap Papua..

Perbedaan lain dari penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada peristiwa yang diteliti yaitu Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, yang dianggap sebagai salah satu momentum yang dihasilkan dari upaya internasionalisasi isu Papua oleh ULMWP dan Benny Wenda.

Berdasarkan seluruh penjelasan permasalahan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *framing* media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* membingkai peristiwa Deklarasi Pemerintahan Papua Barat? Serta bagaimana Jurnalisme Damai dipraktikkan dalam berita *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* berkenaan dengan Deklarasi Pemerintahan Papua Barat?. Dengan demikian penelitian ini bertujuan agar dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana media daring asing membingkai pemberitaan tentang Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, serta melihat bagaimana praktik jurnalisme damai dalam suatu media daring asing, yaitu *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com*.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang memiliki maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan menanalisa

apa yang tidak terlihat, atau ingin melihat isi komunikasi yang tersirat (Moleong, 2014, p. 6). Paradigma konstruktivis digunakan ini untuk menemukan bagaimana konstruksi berita dibangun untuk membingkai kasus Deklarasi Negara Papua Barat oleh media daring asing dalam membentuk realitas media.

Unit amatan dalam penelitian ini adalah media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com*. Dengan unit analisis adalah berita-berita yang diterbitkan *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* terkait kasus Deklarasi Negara Papua Barat selama periode Desember 2020.

Perolehan data primer dilakukan dengan penelusuran situs *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* di internet. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah artikel, jurnal, buku, internet dan sebagainya. Keseluruhan data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* dari Robert N. Entman.

Konsep *framing* Entman digunakan untuk memberi gambaran tentang proses seleksi dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas media terkait berita tentang Deklarasi Negara Papua Barat yang diberitakan *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com*.

Data dari dokumentasi yang diperoleh dialih bahasakan terlebih dahulu

kemudian dianalisis berdasarkan pada struktur analisis *framing* Robert N. Entman yaitu (Eriyanto dalam Launa, 2020): *Define Problems* (pendefinisian masalah) yang memaparkan bagaimana suatu isu atau peristiwa dilihat media; *Diagnoses Causes* (memperkirakan sumber masalah) yaitu menemukan penyebab dari peristiwa; *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral) menentukan nilai moral atau mental yang ditampilkan media untuk mendelegitimasi atau melegitimasi suatu tindakan/aksi; dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) menemukan format penyelesaian yang dipilih media untuk mengatasi masalah. Dari hasil analisis *framing* tersebut kemudian peneliti membuat interpretasi berdasarkan kaidah-kaidah dalam Jurnalisme Damai.

Hasil dan Pembahasan

Dalam struktur mekanisme pasar pasar, media banyak dipaksa berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal, senditif terhadap dinamika persaingan pasar, sehingga dari perspektif industri media informasi adalah penganut kepentingan pasar (Heryanto, 2018, p. 271). Media tidak lepas dari bias kepentingan baik publik maupun bisnis. Hal ini tampak dalam frekuensi penerbitan yang mengutamakan kecepatan *update* berita sehingga seringkali tidak memiliki

kelengkapan unsur 5w + 1H, kendati esensi dari berita tidak berkurang karena selalu melakukan *hyperlink* dalam setiap isi artikel beritanya.

Sedangkan pada media daring asing yang peneliti pilih yaitu *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com*, dalam kurun waktu bulan Desember 2020 hanya ditemukan 1 berita pada masing-masing media. Namun memiliki kelengkapan unsur 5W + 1H serta kedalaman penyajian pemberitaan tanpa perlu menggunakan *hyperlink*. Sehingga total jumlah berita yang dipilih sudah disesuaikan dengan konteks peristiwa yaitu Deklarasi Negara Papua Barat adalah 3 berita.

Tabel 2. Objek Penelitian Media Asing

Media	Waktu Penerbitan	Judul Berita
<i>reuters.com</i>	1 Desember 2020 4:07 PM	<i>Papuans rally for independence from Indonesia as group declares government in exile</i>
<i>abc.net.au</i>	1 Desember 2020 11:00 AM	<i>West Papuan separatist declare provisional government, tell Indonesia to leave the region</i>
<i>time.com</i>	15 Desember 2020 1:19 AM EST	<i>A Racial Justice Campaign Brought New Attention to</i>

		<i>Indonesia's Poorest Region. Will It Translate to Support for Independence?</i>
--	--	---

Sumber: (Da Costa, 2020; Gunia, 2020; Radmehr, 2020)

Analisis Framing Berita reuters.com

Frame: Judul berita setelah diterjemahkan “Warga Papua Berunjuk Rasa Untuk Kemerdekaan Dari Indonesia Saat Kelompok (ULMWP-red) Mendeklarasikan Pemerintahan Dari Pengasingan.”

Judul tersebut dikonstruksi dengan menggabungkan dua kalimat. Kalimat pertama “Warga Papua berunjuk rasa untuk kemerdekaan dari Indonesia,” dan kalimat kedua “Kelompok (ULMWP-red) mendeklarasikan pemerintahan dari pengasingan.” yang merupakan penjelas kalimat pertama. *Framing* pada judul ini mengindikasikan bahwa ada generalisasi bahwa Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh ULMWP merupakan keinginan warga papua secara keseluruhan.

Problem identification: Penekanan masalah yang diidentifikasi dalam berita ini adalah unjuk rasa warga Papua di setidaknya delapan kota di Indonesia untuk memperbarui suara keinginan memerdekakan diri dari Indonesia.

Unjuk rasa tersebut berlangsung pada tanggal 1 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal yang dianggap warga Papua sebagai hari proklamasi kemerdekaan bangsa Papua Barat yang ke 59 yang dianeksasi oleh Indonesia (p1)(p5). Sekaligus menjadi momentum Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh Benny Wenda (p6).

Konstruksi masalah berita tersebut diperkuat dengan menuliskan pernyataan dari Roland Levy, salah seorang mahasiswa Papua yang ikut berdemo di Jakarta yang diwawancara langsung oleh jurnalis *reuters*, serta kutipan pernyataan dari Benny Wenda yang mengatakan "...akan mendorong kemerdekaan dan tidak lagi tunduk pada aturan ilegal Jakarta,"(p7).

Diagnose causes: Pendemo yang ingin menyuarakan kembali kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Penyebab permasalahan yang ditunjukkan oleh *reuters.com* adalah ketidakpuasan warga Papua mengenai aneksasi Indonesia terhadap kemerdekaan Papua (p5), yang dianggap sebagai ketidakadilan dalam pemungutan suara tahun 1969 dengan melakukan intimidasi terhadap bangsa Papua (5). Ditekankan pula penyebab unjuk rasa pada paragraf 12 bahwa dalam setahun terakhir telah terjadi serangan sporadis dan mematikan terhadap penduduk asli Papua, termasuk

pembunuhan beberapa anak Papua di bawah umur dan seorang pendeta dalam beberapa bulan terakhir.

Konstruksi berita oleh *reuters.com* menempatkan masyarakat Papua sebagai korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pemerintah Indonesia dalam mengakuisisi wilayah Papua. Serta pembiaran pemerintah Indonesia atas tindak kekerasan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir.

Make moral judgement: Pembunuhan dan kekerasan di wilayah Papua merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Nilai moral yang ditekankan oleh *reuters.com* memberikan pesan bahwa pembunuhan di luar hukum dan meningkatnya kekerasan di wilayah Papua perlu mendapat perhatian khusus.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ini diindikasikan oleh *reuters.com* dengan menuliskan adanya pembatasan akses bagi jurnalis asing untuk meliput tentang kondisi di Papua (11). Konstruksi ini memunculkan anggapan ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia mengenai keadaan Papua yang sebenarnya.

Hal lain yang ditonjolkan terkait nilai moral adalah dengan menyampaikan keprihatinan PBB dalam pemberitaannya (p13), yang menandakan apa yang terjadi

di Papua sudah menjadi perhatian internasional.

Pernyataan keprihatinan PBB tersebut memberi indikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak tanggap atau cenderung abai dalam mengatasi masalah kemanusiaan di Papua. Apabila hal ini tidak segera diperhatikan dan ditangani secara tepat maka akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia.

Treatment recommendation: Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat sebagai kelanjutan langkah menuju referendum kemerdekaan Papua Barat.

Dalam membingkai pemberitaan unjuk rasa bangsa Papua *reuters.com* menekankan penyelesaian dengan mengusung Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh Benny Wenda dan ULMWP sebagai langkah dalam referendum memerdekaan Papua (p6). Dalam deklarasi tersebut termaktub pernyataan untuk mendorong rakyat Papua tidak lagi tunduk pada aturan militer ilegal di Papua (p7).

Sebagai penyeimbang pemberitaan *reuters.com* juga mengangkat pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah yang mengatakan “Status Papua sebagai bagian dari Indonesia ...sudah final(p9). Dimana proses integrasi-pun diawasi oleh PBB.” (p10). Pernyataan ini menegaskan posisi Papua adalah bagian dari Indonesia. Asas

keberimbangan ini ada meskipun porsinya sangat sedikit dari keseluruhan berita (3 dari 11 paragraf berita).

Analisis Framing Berita abc.net.au

Frame. Judul berita (terjemahan) “Separatis Papua Barat Mendeklarasikan Pemerintahan Sementara, Beri Tahu Indonesia Untuk Meninggalkan Wilayah Tersebut”

Berita yang dirilis *abc.net.au* ini menggunakan dua kalimat. Pertama, “Separatis Papua Barat Mendeklarasikan Pemerintahan Sementara,” Penggunaan kata separatis menunjukkan sebuah perjuangan perlawanan atas pemerintah yang berkuasa, dalam waktu cukup lama sehingga momentum deklarasi tersebut layak untuk diperjuangkan. Kemudian kalimat kedua “Beri Tahu Indonesia Untuk Meninggalkan Wilayah Tersebut,” kalimat ini menyuarakan keinginan rakyat Papua melalui deklarasi untuk merdeka dari Indonesia.

Penggabungan kedua kalimat ini menunjukkan hubungan sebab-akibat yang menjadi *framing* berita bahwa Indonesia sudah tidak berkuasa lagi di wilayah Papua sebab bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya dengan membentuk pemerintahan sementara Papua Barat.

Problem identification: Pemerintah sementara Papua Barat menolak pemerintahan Indonesia.

Dalam teks pemberitaan tentang Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat *abc.net.au* membingkai pemberitaan dengan isu penolakan kedaulatan dengan menonjolkan aspek penolakan atas kehadiran Indonesia di wilayah Papua.

Penonjolan ini terlihat sangat jelas dalam teks berita *abc.net.au*, karena lebih banyak memakai sumber Benny Wenda dari ULMWP, Ray Andrews-Paul aktivis asal Papua yang tinggal di Australia, pemimpin perlawanan sipil Papua Barat Victor Yeimo, dan pemimpin kampanye *Free West Papua* Raki Ap. Sedangkan dari pihak Indonesia hanya ada sedikit pernyataan dari sumber resmi Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah dan Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, sehingga isi berita mengacu pada penolakan kedaulatan Indonesia di wilayah Papua.

Dalam berita ini terindikasi bahwa *abc.net.au* sangat tidak berimbang dalam pemberitaan. Permasalahan yang diangkat dalam teks berita bersumber dari sudut pandang sumber yang pro-Papua Merdeka. Dalam pembedaan mengenai permasalahan yang diperlihatkan, *abc.net.au* mengkonstruksi kehadiran Indonesia adalah ilegal (49). Dalam teks dijelaskan sejarah terbaginya wilayah Pulau *New Guinea* menjadi dua, sejak penjajahan Belanda hingga pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 1961 saat merdeka dari Belanda

yang kemudian pada tahun 1963 Papua Barat diserap ke dalam Indonesia, sekaligus menandai lahirnya sebuah gerakan perlawanan (p6; p11; p12).

Teridentifikasi bahwa *abc.net.au* terhadap masalah kedaulatan Indonesia di wilayah Papua diwarnai dengan kecurangan. Penonjolan pada pernyataan aktivis pro-Papua merdeka bahwa hanya segelintir orang Papua yang dipaksa untuk memilih tidak menjadi negara merdeka di bawah todongan senjata pada plebisit yang diawasi PBB pada tahun 1969 (p19)(p21). Pernyataan ini dikuatkan oleh ULMWP bahwa militer Indonesia mengancam akan membunuh perwakilan Papua jika tidak setuju dengan Indonesia (p22).

Diagnose causes: Pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa dekade.

Akar masalah yang dibingkai *abc.net.au* adalah perlakuan pemerintah Indonesia yang telah melakukan Genosida, Ekosida, dan Etnosida, dengan tuduhan lebih dari 500.000 orang Melanesia telah dibunuh militer Indonesia hingga saat ini (p24). Pasukan Indonesia juga dituduh melakukan penembakan yang mengakibatkan tewasnya seorang siswa berusia 17 tahun (p29). Selanjutnya eksploitasi sumber daya alam Papua oleh Indonesia (p64) membuat orang Papua Barat berjuang menentukan nasib sendiri (p67).

Posisi Indonesia dalam teks berita dikonstruksi sebagai pihak yang berulang kali membantah pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Bantahan Indonesia ditanggapi sederhana oleh pemimpin kampanye *Free West Papua*: "...izinkan media asing masuk dengan bebas...Jika tidak ada yang disembunyikan buka Papua Barat,". Dalam teks berita *abc.net.au* salah satu hasil laporan Amnesty International 2020 yang menyebutkan bahwa jurnalis asing menghadapi pembatasan dan pelecehan saat melaporkan di Papua.

Hal ini mengindikasikan bahwa *abc.net.au* membingkai penolakan kedaulatan Indonesia di wilayah Papua merupakan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang dilakukan oleh Indonesia.

Make moral judgement: Indonesia mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran serta melindungi segenap warga negara dengan memberi rasa aman dan kebebasan.

Dalam pemberitaan kasus deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat nilai moral yang berusaha dikonstruksi oleh *abc.net.au* adalah tidak adanya nilai-nilai kemanusiaan Indonesia terhadap warga Papua dengan terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pembatasan dan pelecehan jurnalis asing mengindikasikan ada yang disembunyikan

oleh pihak Indonesia terkait kondisi Papua sebenarnya (p39).

Kondisi ini mengakumulasi terciptanya suasana tidak nyaman bagi warga Papua dan keinginan merasakan kebebasan yang utuh sebagai warga negara yang merdeka tidak didapatkan dari Indonesia. Konstruksi nilai moral ini ditonjolkan dalam teks "...mengapa orang Papua yang tinggal di sisi barat tidak dapat menikmati kebebasan yang sama seperti yang ada di timur (Papua Nugini-red)," (p14).

Treatment recommendation: Referandum kemerdekaan sebagai solusi yang dibutuhkan Papua Barat.

Referandum kemerdekaan adalah sebuah proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan agar warga Papua dapat memutuskan untuk menjadi negara sendiri atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Pentingnya referandum ini ditonjolkan dengan jelas oleh *abc.net.au* dalam teks "...pemerintahan sementara pertama-tama ingin mengadakan referandum tentang kemerdekaan," (p46). "...aktivis Papua yang memperjuangkan kemerdekaan mengatakan hanya referandum yang dapat memberikan solusi yang dibutuhkan Papua Barat," (p55). Secara keseluruhan teks berita dapat diidentifikasi bahwa *abc.net.au* mengkonstruksi deklarasi pemerintahan

sementara Papua Barat membuka kesempatan bagi bangsa Papua melakukan referendum untuk menentukan nasibnya sendiri terbebas dari Indonesia sebagai pemecahan masalah.

Analisis Framing Berita time.com

Frame. Judul (terjemahan) “Kampanye Keadilan Rasial Menarik Perhatian Baru ke Wilayah Termiskin di Indonesia. Akankah Ini Diterjemahkan Untuk Mendukung Kemerdekaan?”

Judul berita yang disajikan dengan dua kalimat. Kalimat pertama “Kampanye Keadilan Rasial Menarik Perhatian Baru ke Wilayah Termiskin Indonesia,” menunjukkan adanya isu rasial yang dikonstruksi *time.com* kedalam kasus Papua yang dituliskan sebagai wilayah termiskin di Indonesia. Kalimat kedua “Akankah Ini Diterjemahkan Untuk Mendukung Kemerdekaan?” Penggunaan tanda tanya di akhir kalimat menunjukkan penulisan berita model *interpretative news* atau *opinion news*. Mengindikasikan pesan tersembunyi dari *time.com* yaitu mengajak pembaca agar turut berpikir.

Kombinasi kedua kalimat tersebut menunjukkan konstruksi *time.com* dalam pembingkai berita untuk mengajak pembaca ikut berpikir bahkan berempati dengan kasus rasisme yang menimpa warga Papua yang merupakan penduduk wilayah termiskin di Indonesia.

Problem identification: #Papuan Lives Matter meng-Internasionalisasi kasus Papua.

Isu Papua dilihat *tempo.com* sebagai isu rasisme dengan penonjolan aspek yang dipilih mengenai sorotan yang semakin besar terhadap bangsa Papua. Indikasi yang ditemukan dalam teks berita, bahwa *time.com* mewacanakan isu rasisme sebagai isu baru dalam kasus Papua Barat, yang ditonjolkan pada kalimat “Di Indonesia, gerakan tersebut (*#Papuan Lives Matter-red*) membawa perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada diskriminasi yang dihadapi oleh orang Papua,”(p2); “Sebelumnya, perjuangan telah dibicarakan dalam hal kolonialisme, eksploitasi sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia...” (p7).

Dalam konstruksi pemberitaan mengenai permasalahan yang disajikan, *tempo.com* melihat isu Papua ini sebagai imbas dari gerakan protes keadilan rasial yang melanda AS pada pertengahan tahun 2020. Tagar (*#*) *Black Lives Matter* yang mendunia setelah peristiwa yang menimpa warga kulit hitam Amerika George Floyd, saat itu pula dimulai *#Papuan Lives Matter* di media sosial.

Dalam berita terbitan *time.com* *#Papuan Lives Matter* mendorong masyarakat Indonesia untuk turut mempertimbangkan apa yang terjadi di wilayah paling timur dalam konteks

rasisme (p7). Gerakan anti-rasisme global juga telah memicu diskusi baru tentang Papua Barat (p6).

Dalam paragraf pembuka yang menjadi *lead* berita *time.com* menonjolkan kaitan antara gerakan anti rasisme dengan kasus Papua dengan menuliskan postingan sebuah akun instagram “Kita tidak dapat membicarakan #Black Lives Matter tanpa membicarakan tentang Papua Barat,” dan menerima 8500 *like* (p1). Dalam hal ini *time.co* tidak menampilkan berita yang *clear* karena tidak menampilkan sumber asal berita yang bisa dijadikan fakta penulisan.

Diagnose causes: Bangsa Papua diperlakukan berbeda (diskriminasi).

time.com membingkai akar permasalahan dengan menuliskan sub-berita “Sejarah yang panjang dan penuh kekerasan”. Dalam bagian ini naskah berita mengkonstruksi warga Papua sebagai korban kekerasan dan diskriminasi. Penonjolan dengan jelas terletak pada paragraf 9 dimana disebutkan bahwa pengamat hak asasi manusia dan aktivis lokal mengatakan ratusan ribu telah terbunuh sejak tahun 1960-an oleh militer Indonesia. Kemudian pembatasan akses pada media internasional dan pengamat hak asasi, serta pemadaman internet membuat penghitungan sulit ditentukan. *time.com* juga menuliskan keterangan Beby Wenda kalau ia pernah diludahi oleh

siswa dan guru non-papua, dan menyaksikan tentara Indonesia menganiaya keluarganya dan orang lain di desanya.

Konstruksi lainnya mengenai ketimpangan ekonomi dengan menuliskan Papua Barat memiliki sumber daya yang melimpah... tetapi merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia (p12).

Ketegangan yang meningkat pasca kerusuhan tahun 2019 meletus di Papua Barat setelah polisi di Jawa dilaporkan menyebut nama rasis sekelompok pelajar Papua seperti “monyet” (p15).

Konstruksi berita *time.com* terhadap kasus Papua mengindikasikan pihak aparat Indonesia adalah penyebab dari penderitaan warga Papua. Penekanan terhadap konstruksi tersebut terdapat pada pernyataan PBB yang ditulis dalam teks berita “Ada laporan berulang tentang pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekerasan yang berlebihan, penangkapan dan pelecehan dan intimidasi terus menerus terhadap pengunjung rasa dan pembela hak asasi manusia,” (p18)

Make moral judgement:

Dalam tulisannya *time.com* menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah dituduh melanggar hak asasi manusia termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum dan penangkapan dengan motif politik (p11). Indonesia dikonstruksi sebagai pihak yang

bertanggung jawab atas eksploitasi kekayaan alam dengan merusak gunung dan hutan alih-alih melakukan pembangunan infrastruktur di Papua (p13). Terkait eksploitasi hingga mengakibatkan pengrusakan alam, *time.com* mencoba menyisipkan pesan mengenai isu keberlangsungan lingkungan hidup yang juga dilanggar oleh pemerintah Indonesia (p12).

Ada keberimbangan dalam penulisan berita *time.com* dengan menulis pernyataan Wakil Kepala Staf Presiden Jaleswari Pramowardhani. Meskipun tidak secara langsung menyinggung soal dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun dalam keterangannya kepada *time.com* bahwa proses penegakan hukum sedang berlangsung dan pemerintah Indonesia telah memulai pembentukan tim pencari fakta untuk mempercepat proses penegakan hukum yang mencakup pemerintah dan otoritas penegak hukum, dan perwakilan independen dari komunitas akademik, dan masyarakat sipil (p20).

Nilai moral yang ditonjolkan oleh *time.com* dalam teks berita memberikan pesan bahwa perlakuan pemerintah Indonesia seharusnya bisa memastikan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya di luar Papua Barat dengan menjamin rasa aman dan keadilan, menghentikan tindakan yang melanggar

hak asasi manusia juga menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah Papua.

Treatment recommendation: Upaya internasionalisasi isu Papua Merdeka dan *soft diplomacy*.

Dalam pemberitaannya *time.com* menekankan penyelesaian dengan memanfaatkan kampanye anti rasisme global *#Black Lives Matter* yang turut mengkampanyekan *#Papuan Lives Matter* untuk menyebarkan informasi tentang *West Papua* di media sosial untuk menciptakan momentum global bagi perjuangan masyarakat Papua Barat.

time.com juga memberikan contoh gerakan separatis lainnya di Indonesia yang berhasil memerdekakan diri. Menurut *Human Rights Watch*, pada 1999, setelah referendum yang diselenggarakan PBB, Timor Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka Timor-leste. Namun pada prosesnya menelan korban antara 1000 hingga 2000 warga sipil terbunuh pada bulan-bulan sebelum dan beberapa hari setelah pemilihan (p28).

Dalam solusi yang ditawarkan media *time.com* seolah memberikan keberimbangan dalam bagian akhir pemberitaannya dengan menuliskan beberapa pernyataan yang mendorong ke arah *soft diplomacy*. Sophie Chao dari Universitas Sydney memperingatkan

bahwa ada resiko pemerintah Indonesia akan menggunakan dorongan kemerdekaan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan di Papua (p24). Kemudian Webb Ganon, peneliti asal Australia memperingatkan bahwa bahkan orang Indonesia yang menentang pelanggaran hak asasi manusia dan rasisme di Papua barat mungkin tidak mendukung kemerdekaan untuk wilayah yang bergolak, mengingat sentimen nasionalis yang kuat di seluruh Indonesia (p25).

Melalui analisis keseluruhan terhadap teks berita *time.com* dapat diidentifikasi bahwa konstruksi *time.com* dalam pemberitaannya mendukung Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat sebagai langkah maju dalam diplomasi menuju referendum.

Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan reuters.com; ac.net.au; dan time.com

Penelitian ini mengamati kecenderungan dari media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* dalam menyajikan jurnalisme damai pada pemberitaan mengenai isu Papua dan Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat berdasarkan hasil analisis *framing* pada setiap pemberitaan dari ketiga media daring asing tersebut.

Orientasi Perdamaian. Baik *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com*

menunjukkan keberpihakan terhadap bangsa Papua. Porsi keberimbangan dari pihak Indonesia yang hanya mengutip beberapa sumber resmi dalam disajikan dalam pemberitaan dengan porsi yang lebih sedikit.

Dalam pemberitaannya *reuters.com* lebih banyak berfokus pada Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang merupakan pernyataan penolakan ULMWP sebagai representatif warga Papua Barat terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Papua Barat. Fakta bahwa Benny Wenda pemimpin ULMWP mendapat suaka tinggal di Inggris dan berstatus pelarian dari tahanan Indonesia serta mendeklarasikannya dari Inggris menjadi pertimbangan media tersebut untuk tidak terlalu tajam mengulas isu tentang Papua Barat. Namun tetap mendukung diadakannya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat.

Sedangkan media asal Australia *abc.net.au* lebih tegas memberikan dukungan kepada kemerdekaan warga Papua Barat. Sub-berita yang memuat banyak pernyataan-pernyataan aktivis pro-kemerdekaan mengenai kekejaman yang dialami warga Papua Barat dari pemerintah Indonesia terindikasi sebuah berita yang provokatif menempatkan pihak Indonesia sebagai pihak yang bertindak sewenang-wenang terhadap warga Papua.

Agak sedikit berbeda dengan *time.com* dalam aspek keberimbangan dengan lebih banyak menyertakan narasumber dari Indonesia. Namun porsi masih kalah banyak dibandingkan dengan paparan mengenai sejarah kekerasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap warga dan wilayah Papua Barat.

Orientasi Kebenaran. Ketiga media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* memiliki tingkat orientasi hampir sama dalam menyuarakan kebenaran.

Dalam pemberitaannya *reuters.com* tidak banyak membongkar permasalahan yang terjadi antara Papua Barat dan Indonesia. Dengan hanya mengutip pernyataan dari satu sumber yaitu Benny Wenda seputar maksud dan tujuan di deklarasikannya pemerintahan sementara Papua Barat.

Berbeda dengan *abc.net.au* yang dengan jelas memaparkan permasalahan yang dialami sejak kemerdekaan Papua dari Belanda yang tidak berumur lama sampai pengintegrasian Papua Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. *abc.net.au* membongkar permasalahan antara Papua Barat dan Indonesia dengan memaparkan pernyataan berbagai pihak baik asing dan dalam negeri Indonesia yang pro-kemerdekaan Papua.

Sedangkan *time.com* berorientasi pada perkembangan isu rasisme dan efeknya pada internasionalisasi isu Papua Barat, dengan tetap memberitakan fakta-fakta yang terjadi. Akan tetapi memiliki kelemahan dari penyebutan sumber berita dimana *time.com* kerap tidak menyertakan sumber informasi yang didapatkan.

Orientasi Pada Masyarakat. Ketiga media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* memberitakan kebenaran dari satu sisi yaitu narasumber pro-kemerdekaan Papua. Pemaparan mengenai penderitaan yang dialami masyarakat Papua hampir memenuhi seluruh isi pemberitaan.

Sedangkan kebenaran dari pihak Indonesia hampir atau bisa dikatakan tidak ada. Keberimbangan yang di munculkan dalam setiap pemberitaan hanyalah pernyataan-pernyataan dari pihak Indonesia yang bersifat penyangkalan atas semua tuduhan. Sehingga fokus orientasi ketiga media daring asing tersebut tidak ada yang berfokus pada pihak yang merintis perdamaian. Beberapa pernyataan dari PBB yang jumlahnya sedikit sekali justru semakin menguatkan posisi warga Papua yang menjadi korban dari kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia.

Orientasi Pada Penyelesaian. Solusi yang ditawarkan ketiga media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* mengarah pada referendum

untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat. Tidak ada rekomendasi untuk rekonsiliasi yang disebutkan dalam setiap pemberitaan.

Simpulan

Framing ketiga media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* terkait peristiwa Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat meletakkan ULMWP dan Benny Wenda sebagai tokoh utama dalam menyuarkan perjuangan kemerdekaan Papua Barat di panggung Internasional. Pandangan khalayak diarahkan untuk melihat isu Papua sebagai isu global sehingga perlu mendapat perhatian. Bahwa selama ini bangsa Papua hidup dalam penderitaan sehingga pantas untuk merdeka. Sedangkan pihak pemerintah Indonesia di posisikan sebagai pihak yang bersalah dengan hanya melakukan penyangkalan dan berpegang pada status Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan sudah disetujui PBB.

Mengenai praktek Jurnalisme Damai dalam setiap pemberitaan ketiga media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* tersebut, ketiganya tidak menerapkan jurnalisme damai secara keseluruhan. Dengan tidak memberi kesempatan bersuara kepada kedua belah pihak yang bertikai maupun yang berempati pada aspek orientasi pada perdamaian.

Kemudian pada sisi orientasi pada kebenaran pembongkaran masalah hampir seluruhnya pada masalah yang diderita oleh bangsa Papua.

Lalu orientasi pada masyarakat ketiga media daring asing *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* berfokus pada kesengsaraan bersama, menyebutkan Indonesia sebagai penyebab masalah namun masih berfokus pada pihak yang membangun perlawanan terhadap kedaulatan Indonesia bukan pada pihak yang merintis perdamaian.

Sedangkan pada aspek orientasi pada penyelesaian ketiga pemberitaan berorientasi pada penyelesaian melalui referendum kemerdekaan Papua Barat. Meskipun hasilnya diperkirakan akan meredakan konflik Papua Barat untuk menciptakan suasana damai, namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hingga saat ini pemerintah Indonesia tidak mengakui Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat dan menolak tegas pemisahan Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dengan tendensi keberpihakan yang tidak seimbang dari ketiga media daring asing tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberitaan *reuters.com*, *abc.net.au*, dan *time.com* masih berpotensi mempertajam konflik antara masyarakat Papua Barat yang menghendaki kemerdekaan dengan

pemerintah Indonesia yang setia dengan NKRI. Peneliti ingin menyampaikan rekomendasi agar di era keterbukaan informasi ini, pemerintah dapat membuka seluas-luasnya informasi tentang konflik dan isu di Papua terhadap media dunia sebagai kontra propaganda serta menghindari ketidak berimbangan penulisan berita terkait isu Papua pada media-media asing. Sehingga para jurnalis asing dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya, serta langkah-langkah rekonsiliasi damai yang dijalankan pemerintah dan meminimalisir eksposur berlebihan atau bahkan keliru tentang kekerasan bersenjata di tanah Papua. Hal ini sekaligus menjadi kontrol bagi pihak pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan dan mengupayakan lebih baik lagi untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan cara damai.

Daftar Pustaka

- Alam, S. (2020). Jurnalisme Damai dalam Peningkatan Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 121–136.
- Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R. (2020). Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(2), 203.
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1668>
- CNNIndonesia. (2020). *Menlu Panggil Dubes Inggris soal Deklarasi Papua Benny Wenda*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201203153750-106-577607/menlu-panggil-dubes-inggris-soal-deklarasi-papua-benny-wenda>
- Da Costa, A. B. (2020). *Papuans rally for independence from Indonesia as group declares government in exile* / Reuters. Reuters.Com.
<https://www.reuters.com/article/idUSKBN28B48Q>
- Dewi, S. (2020). *Media Asing Soroti Benny Wenda Bentuk Pemerintahan di Papua*. Idntimes.Com.
<https://www.idntimes.com/news/world/santi-dewi/media-asing-soroti-deklarasi-benny-wenda-bentuk-pemerintahan-di-papua/3>
- Eryanto, N. V., Lesmana, F., & Wijayanti, C. A. (2019). Wacana Pemberitaan Separatisme Papua dalam Harian Jawa Pos. *Jurnal E-Komunikasi*, 7(2).
- Gunia, A. (2020). *A Racial Justice Campaign Brought New Attention to Indonesia's Poorest Region. Will It Translate to Support for Independence?* Time.Com.
<https://time.com/5919228/west->

- papua-lives-matter-independence/
Harvey, G. (2015). The Price of Protest in Papua. *Griffith Journal of Law & Human Dignity*, 3(1), 170–203.
- Heryanto, G. (2018). *Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa Media Di Panggung Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hutami, M. F., & Sjafirah, N. A. (2019). Framing Media Online Tribunnews.Com Terhadap Sosok Perempuan Dalam Berita Video Pornografi Depok. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(1), 25–43.
<https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.21072>
- Komarudin, A. (2016). *Quo Vadis Kebebasan Pers di Papua?* Pusat Penelitian Politik.
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/1078-quo-vadis-kebebasan-pers-di-papua>
- Launa. (2020). Sandiaga Uno dalam Konstruksi Media. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 31–46.
<https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.656>
- Lynch, J., & McGoldrick, A. (2013). Responses to peace journalism. *SAGE Journals*, 14(8), 1041–1058.
- Malo, Y. (2017). Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969. In *Universitas Sanata Dharma*.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Murtaufiq, S. (2019). *Mengungkap Kepentingan Asing di Balik Peristiwa Papua - The Global Review*. The Global Review. <https://theglobal-review.com/mengungkap-kepentingan-asing-di-balik-peristiwa-papua/>
- Radmehr, N. (2020). *West Papuan separatists declare provisional government, tell Indonesia to leave the region - ABC News*. Abc.Net.Au. <https://www.abc.net.au/news/2020-12-01/west-papuan-separatists-provisional-government-to-oust-indonesia/12936404>
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 91.
<https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8679>
- Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D. (2020). Framing of Online Media News about Riots in Papua (Studies on www.detik.com and www.reuters.com in 2019). *Journal Pekommas*, 5(1), 81.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050109>
- Wijaya, P. (2018). *Campur Tangan Australia dan Respons PBB Dalam*

Isu Papua / merdeka.com.

Merdeka.Com.

<https://www.merdeka.com/dunia/campur-tangan-australia-dan-respons-pbb-dalam-isu-papua.html>

Yoedtadi, M. G., Loisa, R., Sukendro, G.

G., Oktavianti, R., & Savitri, L.

(2020). Challenges of Peace

Journalism on Post Conflict Regions.

Jurnal Penelitian Komunikasi Dan

Opini Publik, 24(1).

[https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.2](https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.2730)

730